

ABSTRAK

Tendri Nuraden, 2024. *“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Ketertiban Masyarakat di Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muhammad Akbar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menertibkan masyarakat serta mengetahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap ketertiban masyarakat dalam mencegah tindak pelanggaran atau tindak kejahatan di Kota Palopo. Fokus utama penelitian ini adalah apa saja kebijakan yang telah diimplementasikan terkait ketertiban masyarakat di Kota Palopo, kemudian bagaimana upaya Polisi Pamong Praja dalam mengawasi ketertiban masyarakat di Kota Palopo, dan bagaimana dampak pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap ketertiban di masyarakat Kota Palopo. Jenis penelitian empiris dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah menerapkan 7 kebijakan peraturan daerah salah satu fokus kebijakan utamanya yakni Peraturan Perda No.10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 15 upaya yang terapkan sebanyak 640 penerapan. Kemudian, hasil analisis statistik penelitian ini menunjukkan kolerasi bahwa kebijakan pemerintah daerah di Kota Palopo memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban masyarakat. Berarti, setiap peningkatan satu unit kebijakan maka ada peningkatan 0.795 unit dalam ketertiban masyarakat, menegaskan pentingnya kebijakan yang efektif, konsisten secara aktif, dan kolaborasi dengan lembaga lain dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga mampu menanggulangi atau mencegah tindak kejahatan terutamanya usia produktif di Kota Palopo. Saran penelitian ini yaitu, pemerintah Kota Palopo perlu mendukung Satpol PP dengan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan alokasi dana memadai, serta sosialisasi dan evaluasi rutin untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum. Kerjasama antara Satpol PP dan Kepolisian serta lembaga lain harus diperkuat melalui kolaborasi aktif, penerapan yang konsisten, komunikasi baik, dan pelatihan bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman guna mencegah tindak kejahatan atau tindak pelanggaran. Masyarakat Palopo diharapkan aktif dalam program keamanan, segera melaporkan kejahatan, serta bekerja sama dengan aparat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja.